

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PERIODE 2016-2020

Sulaiman ¹⁾, Grace Kelly Sihombing ²⁾, & Anistya Fitri Larasati ³⁾

^{1, 2, 3} Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak

¹ email: imansulaiman137@yahoo.co.id

² email: gracekellysihombing@gmail.com

³ email: anistya.fl@gmail.com

Abstract

The reason for choosing Sambas Regency was because: (1) the Regent of Sambas was that his period was almost over; (2) The Regent of Sambas as the first regent who hafidz quran. (3) Mr. Atbah Romin Suhaili has a good performance in the government report version. However, these achievements need to be proven by people's perceptions, because increasing according to the elite level does not necessarily increase according to society. To measure its performance, it uses the mission of the Regent and also the achievements of the Regent as mentioned above, and uses performance indicators, namely productivity, quality, quantity, timeliness, and effectiveness. This type of research used in this research is quantitative research. The research location is located in Teluk Keramat District, which consists of 25 villages. Of 19 sub-districts in Sambas Regency, the percentage of poor people in this sub-district is in the top position. The sampling technique used in this research is proportional sampling, which is based on the number of residents in each village. Data analysis for the questionnaire used an index scale. The overall performance of the Sambas Regency Government during the leadership in 2016-2020 was in the good category with an average index of 2.73.

Keywords: *Community Perception, Government Performance*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya otonomi daerah setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Undang-undang No.23 tahun 2014). Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah menurut Syarif Saleh (2020) Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah mereka sendiri di mana hak-hak ini adalah hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintahan daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari bawahannya, mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menjadi kreator, inovator dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah (Kaloh, 2013: 6).

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan

sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari Pemerintah Daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan nasional (Awwaliyah, Agriyanto, & Farida, 2019). Dengan demikian, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus saling berkerjasama untuk mencapai tujuan daerah.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 2008), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. Pertama, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Kedua, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Ketiga, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. Keempat, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Keberhasilan dari pembangunan nasional juga ditentukan dari keberhasilan sebuah daerah, sehingga jika kinerja dari Pemerintah Daerah buruk akan berdampak pada pemerintahan Nasional, yaitu rendah atau berkurangnya kinerja efektivitas penyelenggaraan Nasional. Dengan demikian, Kepala Daerah dan perangkat daerah harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan daerah.

Menurut Kaloh (2013: 4) Kepala Daerah merupakan komponen strategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal organisasi maupun pelayanan

eksternal kepada masyarakat. Seorang Kepala Daerah menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi, dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat.

Setiap Daerah berlomba-lomba agar dapat membuat daerahnya maju dan masyarakatnya sejahtera, seorang Kepala Daerah harus kreatif dan inovatif sehingga roda pemerintahan yang berada di tangannya mampu untuk dikendalikan dan perangkat daerah mampu menjalankan kewajibannya. Hal yang menjadi perhatian dengan adanya otonomi Daerah adalah semakin banyaknya dinasti politik dalam sebuah kepemimpinan Daerah di Indonesia setelah adanya otonomi daerah.

Fokus dari penelitian ini untuk melihat kinerja dari Bupati yang "katanya" banyak prestasi yang diraihinya selama memimpin sebagai kepala Daerah. Kabupaten Sambas menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di Provinsi Kalimantan Barat, karena kabupaten ini langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

Penelitian ini berawal adanya klaim-klaim atau capaian dari Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Bupati saat menjabat sebagai Bupati Sambas dan juga indikator kinerja Pemerintah Daerah yang mencapai 100%. Berikut hasil capaian dari Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2016-2020 (Sambas.go.id, diakses 7 September 2020), yaitu: Pergerakan IPM Kab Sambas dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan trend meningkat. Pada tahun 2016, nilai IPM Kab Sambas berada pada 59,81, tahun 2017 dengan nilai 60,57, tahun 2018 61,53, tahun 2019 dengan nilai 62,47 dan tahun 2020 meningkat menjadi 63,28.

Aspek rata-rata lama sekolah atau RLS, Kab Sambas tahun 2016 berada pada angka 5,11, tahun 2017 berada pada angka 5,23, tahun 2018 berada pada angka 5,35, tahun 2019 berada pada angka 5,48 dan

tahun 2020 berada pada angka 5,80. Dilihat dari aspek pengeluaran per kapita disesuaikan dalam ribuan, tahun 2016 didapat nilai 7858, tahun 2017 dengan nilai 8242, tahun 2018 dengan nilai 8673, tahun 2019 dengan nilai 9083 dan tahun 2020 dengan nilai 9153. Hasil penjumlahan semua aspek di atas, didapat nilai IPM untuk tahun 2016 sebesar 59,81, tahun 2017, sebesar 60,57, tahun 2018 sebesar 61,53, tahun 2019 sebesar 62,47 dan tahun 2020 sebesar 63,28.

Capaian indikator pendidikan tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam RPJMD, point angka melek huruf umur 15 hingga 44 tahun, capaian tahun 2017 didapat nilai 98,57, tahun 2018 dengan nilai 98,88, tahun 2018 dengan nilai 99, 59. Aspek angka rata-rata lama sekolah capaian tahun 2016 dengan nilai 6,21, tahun 2017 dengan nilai 6,30 dan tahun 2018 turun menjadi 5,8. Angka partisipasi kasar atau APK SD Sederajat capaian tahun 2016 dengan nilai 113,69, tahun 2017 dengan nilai 114,71 dan capaian tahun 2018 dengan nilai 112,08. APK jenjang SMP Sederajat capaian tahun 2016 dengan nilai 85,79, capaian tahun 2017 dengan nilai 93,83, dan capaian tahun 2018 dengan nilai 97 , 67.

APK jenjang SMA Sederajat, capaian tahun 2016 dengan nilai 63,03, capaian 2017 dengan nilai 65,63, capaian tahun 2018 dengan nilai 66,23. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD Sederajat tahun 2016 dengan nilai 5,35, tahun 2017 dengan nilai 15 , 20, tahun 2018 dengan nilai 14 , 12. Jenjang SMP Sederajat tahun 2016 untuk aspek ini dengan nilai 1,63, tahun 2017 dengan nilai 5,07, tahun 2018 dengan nilai 6,89. Pada jenjang SMA Sederajat dengan aspek yang sama, capaian tahun 2016 dengan nilai 1,51, tahun 2017 dengan nilai 3,15, tahun 2018 dengan nilai 5,48.

Melihat APM atau angka partisipasi murni, jenjang SD Sederajat tahun 2016 dengan nilai 94,54, tahun 2017 dengan nilai 95,30, tahun 2018 dengan nilai 91,36. Jenjang SMP Sederajat, tahun 2016 dengan nilai 61,61, tahun 2017 dengan nilai 70,23,

tahun 2018 dengan nilai 72,25. Jenjang SMA Sederajat, capaian tahun 2016 dengan nilai 45,95, tahun 2017 dengan nilai 40,99 dan tahun 2018 dengan nilai 45,97.

Jika melihat indikator untuk infrastruktur jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016 dengan nilai 39,75, tahun 2017 dengan nilai 42,94, dan tahun 2018 dengan nilai 46,64. Jalan Desa dalam kondisi baik capaian tahun 2016 dengan nilai 39,40, tahun 2017 dengan nilai 43,95 dan tahun 2018 dengan nilai 47,43. Untuk pengairan, panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder dan tersier) capaian tahun 2016 dengan nilai 63,72, tahun 2017 dengan nilai 74,13 dan tahun 2018 dengan nilai 77,51.

Alasan mengambil Kabupaten Sambas karena: (1) Bupati Sambas adalah periodenya sudah hampir selesai; (2) Bapak Atbah Robin Suhaili sebagai Bupati Sambas pertama kali yang hafidz Qur'an. (3) Bapak Atbah Robin Suhaili memiliki kinerja yang baik versi laporan pemerintah. Selain itu, adanya capaian-capaian dari Pemerintah Kabupaten Sambas, seperti nihil Desa sangat tertinggal, tertinggi capaian Desa mandiri dan lain-lain. Akan tetapi, capaian-capaian tersebut perlu dibuktikan dengan persepsi masyarakat, karena meningkat menurut level elit belum tentu meningkat menurut masyarakat. Dengan demikian, diperlukannya bukti nyata untuk melihat kesesuaian antara capaian pemerintah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Untuk pengukuran kinerjanya menggunakan misi Bupati dan juga capaian-capaian dari Bupati seperti yang telah disebutkan di atas, dan menggunakan indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas publik.

Sementara itu, alasan mengambil di Kecamatan Teluk Keramat: (1) Secara geografis kecamatan ini memiliki umlah desa paling banyak dibanding kecamatan yang lain. Hal ini berkaitan dengan selama 5 tahun kepemimpinannya pernah atau tidak berkunjung ke kecamatan, untuk

sekedar menjaring aspirasi masyarakat, melihat keadaan langsung di lapangan, karena seorang Bupati turun ke daerah itu cukup penting dan bisa menghasilkan dampak yang luas biasa. Inspeksi dadakan yang dilakukan seorang Bupati akan membuat perangkat daerah menjadi lebih disiplin dalam bekerja; (2) Kecamatan Teluk Keramat merupakan daerah dengan sebaran tanah gambut yang luas terutama di desa Berlimang; (3) Teluk Keramat merupakan kecamatan dengan sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh sungai, namun dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas presentase jiwa miskin di kecamatan ini berada di posisi paling atas.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2016-2020.

Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Teluk Keramat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2016-2020?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Teluk Keramat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas Periode 2016-2020.

KAJIAN LITERATUR

Persepsi

Menurut Slameto (2010: 102) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke otak manusia melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium.

Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan tanggung awab yang diberikan.

Pengukuran Kinerja

Setiap kinerja dari sebuah organisasi maupun individu dapat diukur menggunakan indikator dan faktor-faktor tertentu. Menurut Robbins (2016: 260) terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja:

- 1) Produktivitas merupakan perbandingan antara luaran (*output*) dengan masukan (*input*).
- 2) Kualitas Layanan adalah sangat penting dalam menjelaskan kinerja dari organisasi publik. Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
- 3) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
- 5) Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Teluk Keramat dengan jumlah populasi 60.579 dan jumlah sampel 100 orang yang tersebar di 25 Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah Survei dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah skala indeks untuk menghitung hasil dari kuesioner.

HASIL

Gambaran Umum Identitas Responden

Dari hasil penentuan sampel, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 konsumen, pengambilan sampel sebanyak 100 mengacu pada teori Donald R Cooper yang mengasumsikan bahwa populasi adalah tak terbatas. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kuesioner yang telah dibagikan diperoleh data mengenai gambaran tentang data

individu dari responden, yang meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan.

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 eksemplar dan kembali kepada peneliti berjumlah sama, yaitu 100 eksemplar. Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Penyebaran kuesioner	100
Kuesioner kembali	100
Kuesioner yang dapat dianalisis	100
Kuesioner yang tidak kembali	-
Tingkat pengembalian	100%

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	Pria	15	15%
2	Wanita	85	85%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden masyarakat kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagian besar adalah wanita berjumlah 85 responden (85%) sedangkan 15% nya lagi dari kalangan pria yaitu berjumlah 15 responden.

Jumlah Responden Berdasarkan Umur

Identitas responden berdasarkan umur pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Umur Responden

No	Kelompok Usia	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	<25	14	14%
2	26-35	35	35%
3	36-55	45	45%
4	>55	6	6%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat kecamatan

Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang berusia <25 tahun sebanyak 14 responden

(14%), usia 26-35 tahun sebanyak 35 responden (35%), usia 36-55 tahun sebanyak 45 responden (45%) dan usia >55 tahun sebanyak 6 responden (6%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok usia responden atau masyarakat kecamatan Teluk

Keramat Kabupaten Sambas antara 36-55 tahun dengan tingkat persen sebanyak 45%.

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

Identitas responden berdasarkan pendidikan pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah (Responden)	Persentase (%)
1	SD	10	10%
2	SMP	16	16%
3	SMA	45	45%
4	D3	9	9%
5	S1	20	20%
6	S2	0	0%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa responden atau masyarakat kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas di dominasi oleh responden yang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 45 responden (45%), responden dengan pendidikan SD sebanyak 10 responden (10%), pendidikan SMP sebanyak 16 responden (16%), pendidikan D3 sebanyak 9 responden (9%), dan S1 sebanyak 20 responden (20%).

Capaian Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Bupati saat mencalonkan dalam pemilukada, dan juga berdasarkan indikator kinerja yang ada dalam LKJ 2020 secara keseluruhan mendapatkan nilai rata-rata indeks 2,73 dengan kriteria baik. Capaian yang diungkapkan oleh level elit, dan juga indikator kinerja dilihat dari LKJ sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat Teluk Keramat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai rata-rata dengan kriteria kurang baik terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut.

Sementara itu, hasil dari kinerja berkaitan dengan aspek produktifitas nilai rata-rata indeksnya adalah 2,74 dengan

kategori baik. Hal ini karena efektifitas dan efisiensi birokrasinya yang sudah baik dan membuat masyarakat puas, selain itu juga masyarakat mengatakan bahwa Bupati memiliki dedikasi yang baik.

PEMBAHASAN

Aspek kualitas layanan rata-rata indeks yang diperoleh 2,96 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan oleh kantor pemerintah, selain itu juga adanya peningkatan pada sarana prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat dan hasil yang ada dalam Laporan Kinerja Pemerintah telah sesuai, sehingga peningkatan kesehatan dan kualitas pelayanan yang meningkat bukan hanya berdasarkan pandangan level elit.

Aspek responsivitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,69 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Sementara itu, yang pengangguran juga mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena Bupati mampu membuka lapangan pekerjaan. Aspek responsivitas ini berguna untuk melihat respon dari pemerintah daerah terkait kebutuhan masyarakat, jika kebutuhan masyarakat direspon oleh pemerintah akan terjadi peningkatan dalam sektor tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pendidikan meningkat, kualitas dan sarana prasarana ekonomi mengalami perbaikan, sarana publik dalam penanggulangan bencana juga meningkat, masyarakat sejahtera ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, hal ini terjadi karena pemerintah daerah mampu dan cepat tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Aspek akuntabilitas rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah. Akan tetapi, dalam hal transparansi pengelolaan keuangan belum dilakukan, karena masyarakat masih belum tahu terkait APBD, PAD dan penerimaan daerah lainnya yang diperoleh untuk menjalankan program apa saja. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Sambas belum menerapkan *e-budgeting*. Sementara itu, terkait transparansi birokrasi juga perlu diperbaiki, karena masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat seputar apa yang terjadi di pemerintahan.

Dalam penelitian ini, perbedaan persepsi dari setiap masyarakat disebabkan karena sebuah persepsi terbentuk dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu terbentuk berdasarkan pengalaman, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Akan tetapi, faktor yang paling banyak mempengaruhi adalah pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan untuk faktor eksternal itu

dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, serta berasal dari orang-orang terdekat atau dapat juga disebut *social relationship*. Contohnya masyarakat dapat mengatakan bahwa adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan namun tidak pernah melihatnya sendiri, persepsi tersebut terbentuk karena mendengar dari orang terdekat. Hal ini kemudian mempengaruhi seorang individu dalam memberikan persepsi terkait kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sambas.

Selain itu, dalam memberikan persepsi juga mempertimbangkan segi positif dan negatif. Maksudnya adalah ketika seorang individu mendapatkan dampak yang positif dari kinerja Bupati maka akan cenderung memberikan persepsi yang baik pula. Hasil dari pengamatan peneliti yang lain adalah melihat keadaan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, selain itu juga melihat langsung Puskesmas dan cara pelayanannya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini jika dilihat dari 4 aspek produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas keseluruhannya baik. Untuk aspek produktifitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,74 dengan kategori baik karena, selain itu juga lebih efektif, efisien, serta Bupati memiliki dedikasi yang baik.

Aspek kualitas layanan rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,96 dengan kriteria baik, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan yang diberikan meningkat, selain itu kualitas dan sarana prasarana kesehatan juga mengalami peningkatan dan perbaikan, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Aspek responsivitas rata-rata indeks yang diperoleh 2,64 dengan kriteria baik, karena meningkatnya kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, selain itu juga sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Akan tetapi, yang belum mampu ditangani adalah pengangguran karena tidak mengalami penurunan, hal ini disebabkan ketidakmampuan Bupati untuk membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu terkait jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan belum merata dan tidak tepat sasaran. Aspek akuntabilitas rata-rata indeks yang diperoleh adalah 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas, Bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi, dalam hal transparansi pengelolaan keuangan belum dilakukan, karena masyarakat masih belum tahu terkait APBD, PAD dan penerimaan daerah lainnya yang diperoleh untuk menjalankan program apa saja.

Kinerja keseluruhan Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2016-2020 dalam kategori baik dengan rata-rata indeks 2,73. Hasil ini diperoleh berdasarkan jawaban dari masyarakat, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki yaitu jaminan kesehatan yang belum merata dan belum tepat sasaran, karena 2 hal tersebut yang dinilai kurang baik oleh masyarakat. Akan tetapi, terkait capaian yang diungkapkan oleh level elit dan juga indikator kinerja yang mencapai 100% dalam LKJ 2020 juga dirasakan oleh

masyarakat Teluk Keramat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai rata-rata dengan kriteria kurang baik terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Sambas tersebut.

REFERENSI

- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Saleh S. 2020. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kaloh. 2013. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Slameto. 2010. *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta Tahun terbit
- Mengkunegara, Anwar Prabu. 2016. *Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Refika Aditama.
- Robbins. 2016. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tribun Pontianak.co.id, diakses 7 September 2020
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2018 tentang *Pemerintahan Daerah*